

Dilema Kebijakan Revitalisasi Pemanfaatan Danau Tempe Kabupaten Wajo

Besse Syahriana Darti^{1*}, Laili Bariroh², Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman³

¹Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

²Departemen Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel, Indonesia

³Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Datokarama Palu, Indonesia

*email korespondensi: bessesahriana17@gmail.com

Abstract: *This paper aims to analyze the conflicts occurred related to the revitalization and utilization program of Lake Tempe by the Wajo Regency Government in collaboration with the Central Government through PUPR has carried out a revitalization policy for Lake Tempe. The government views that this policy needs to be implemented in relation to the condition of Lake Tempe which is experiencing siltation which then has implications for flooding when the water discharge in the lake increases in the rainy season. Based on the research conducted, it appears that the Lake Tempe revitalization policy issued by the government has caused resistance among the community. Lake Tempe is widely used by the community to support their economy as fishermen and traditional farmers. However, the large number of community activities in Lake Tempe has resulted in the silting of the lake so that every year in the rainy season there will be floods that submerge the residential area of the community in a fairly wide area. Based on this condition, then revitalization becomes an important program to be implemented. However, from the perspective of the community, revitalization activities will have negative implications for their economic activities. This then has implications for conflicts that occur between local communities and the government.*

Keyword(s) : Public Policy, Revitalization, Lake of Tempe, Wajo

Pendahuluan

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah potensi sumberdaya perairan yang dapat ditemukan hampir disetiap daerah, baik potensi perairan laut maupun perairan daratan. Potensi tersebut menjadi salah satu modal utama untuk dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu klasifikasi perairan daratan adalah sumberdaya perairan danau. Sebagian besar ekosistem danau di Indonesia berada dalam kondisi kritis, hal ini di sebabkan oleh faktor manusia dan di perparah oleh pemanasan global serta perubahan iklim yang terjadi secara massif saat ini. Danau sebagai salah satu sumberdaya perairan daratan saat ini juga tengah menghadapi permasalahan kerusakan lingkungan yang bersumber dari eksploitasi perikanan, mekanisme transportasi air, buangan limbah, dan perubahan tata ruang di daerah aliran sungai (Muta"ali, 2012).

Danau adalah salah satu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Untuk memenuhi kepentingan manusia, lingkungan sekitar danau seringkali diubah untuk disesuaikan dengan cara hidup dan

bermukim manusia. Ruang dan tanah di sekitar kawasan ini kemudian akan dirombak untuk menampung berbagai bentuk kegiatan manusia seperti permukiman, prasarana jalan, saluran limbah rumah tangga, tanah pertanian, perkebunan, rekreasi dan sebagainya. Pemanfaatan sumberdaya di perairan daratan umumnya merupakan suatu kompleksitas aktivitas ekonomi. Pemanfaatan tersebut terdiri dari beberapa pengguna dengan kepentingan yang berbeda dalam pemanfaatannya. Ciri utama dari pemanfaatan sumberdaya perairan danau sangat bergantung terhadap fluktuasi tinggi muka air perairan. Aktivitas perikanan mulai aktif pada awal musim penghujan, sementara kegiatan pertanian pangan juga dimulai di wilayah yang belum tergenang luapan danau. Kedua aktivitas inilah yang seringkali menjadi mata pencaharian utama masyarakat yang bermukim di sekitar danau (Uzwa, 2007).

Kabupaten Wajo dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya perairan daratan yaitu Danau Tempe. Danau Tempe merupakan salah satu danau yang mempunyai potensi yang cukup besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif terletak dalam 3 wilayah administratif kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng. Besarnya potensi tersebut menjadi modal utama dalam sistem ekonomi masyarakat setempat, terutama terhadap masyarakat nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari keberadaan danau (Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo, 2011)

Sejak dahulu, para leluhur mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya arti danau bagi kehidupan mereka. Danau adalah sumber mata pencaharian yang diibaratkan sebagai diri sendiri. masyarakat mengumpamakan danau seperti anggota tubuh mereka sendiri, masyarakat Wajo, terutama mereka yang tinggal disekitar danau dan menggantungkan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak terhadap danau dan biota yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, masyarakat berupaya untuk memperlakukannya seperti memperlakukan diri sendiri (Setiawan, 2003)

Danau Tempe menjadi salah satu pusat aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Wajo. Hal ini terlihat dari pemanfaatan danau secara berbeda tergantung musim baik musim kemarau maupun musim hujan. Pemanfaatan ini telah menimbulkan implikasi negatif bagi eksistensi Danau Tempe itu sendiri dengan terjadinya pendangkalan yang tentunya dapat membawa potensi ancaman banjir. Untuk itu kemudian Danau Tempe yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup telah ditetapkan sebagai danau prioritas nasional memaksa pemerintah setempat untuk melakukan penataan danau sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan keanekaan endemik, serta fokus untuk menyelesaikan infrastruktur dan potensi pertanian serta penyelamatan ekosistem perairan danau.

Revitalisasi danau sebagai bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat bertujuan untuk mempertahankan dan memperdalam genangan permanen sehingga ekosistem sektor perikanan tetap terjaga. Selain itu, hal ini penting dilakukan terkait dengan realita adanya tantangan peningkatan curah hujan yang berakibat pada adanya kecenderungan peningkatan suhu udara minimum dan maksimum sehingga mengakibatkan meningkatnya banjir. Tetapi kemudian dalam tataran implementasi, revitalisasi yang dilakukan tidak selalu mendapatkan dukungan oleh semua *stakeholders*, tantangan kemudian mengemuka ketika sebagian

masyarakat utamanya nelayan kecil dan petani yang menggantungkan hidupnya di Danau Tempe melakukan penolakan terhadap revitalisasi yang dilakukan karena revitalisasi akan menghilangkan lahan pertanian yang biasaya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, dampak lain dari revitalisasi adalah berkurangnya ikan hasil tangkapan nelayan tradisional yang ada di Danau Tempe. Hal ini nampaknya terkait dengan adanya fakta bahwa pemanfaatan Kawasan Danau Tempe mengalami perkembangan yang luar biasa termasuk pada kegiatan lain misalnya untuk pertanian yang memanfaatkan lahan kawasan Danau Tempe ketika air sudah surut. Masalahnya yang lebih kompleks kemudian mengemuka ketika di lahan sekitar sempadan danau telah memiliki berbagai jenis hak pengelolaan bahkan telah terdapat hak kepemilikan oleh penduduk lokal.

Selain permasalahan ekosistem, konflik lingkungan sosial juga berpotensi untuk mengemuka sebagai implikasi dari pola pemanfaatan lahan di Kawasan Danau Tempe. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah adanya hak kepemilikan masyarakat terhadap wilayah di Kawasan danau tempe yang secara *de facto* merupakan tanah negara yang penguasaannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kepemilikan masyarakat terhadap wilayah di Kawasan Danau Tempe terbukti dengan kepemilikan SPPT masyarakat. Dengan hak kepemilikan tersebut masyarakat kemudian melakukan pola pemanfaatan danau yang dapat memberikan efek negatif terhadap keberadaan Danau Tempe sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat disekitarnya.

Berbagai aktivitas dalam memanfaatkan wilayah Danau Tempe telah menimbulkan masalah yang mendorong pemerintah untuk melakukan upaya revitalisasi. Kebijakan revitalisasi merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat melalui PUPR dengan pemerintah daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi Danau Tempe sebagai sumber air yang dapat mencegah banjir dan ekosistem berbagai biota yang mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Namun upaya tersebut nampaknya telah memicu munculnya konflik yang tidak saja melibatkan masyarakat dengan pemerintah, namun juga masyarakat dengan masyarakat terkait dengan efek revitalisasi yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Metode

Tulisan ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Wajo pada tahun 2021. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendekatan tersebut maka data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci yang telah ditentukan sejak awal. Para informan kunci merupakan orang-orang yang terlibat maupun yang mengetahui permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, para informan terdiri dari Pihak PUPR, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar Danau Tempe. Selain data primer, data sekunder diperoleh melalui berbagai catatan data yang ada dari berbagai sumber yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Diskusi

1. Revitalisasi Sebagai Kebijakan berorientasi kemanfaatan bagi masyarakat

Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai/lahan kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (Pasal 1 Ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya (Pasal 1 Ayat 4). "Revitalisasi" dalam pengertian luas dan mendasar adalah "menghidupkan dan menggiatkan (kembali) faktor-faktor pembangunan (tanah, tenaga kerja, modal, keterampilan dan kewirausahaan, ditambah kelembagaan keuangan, birokrasi, serta didukung sarana/prasarana fisik); dan para pelaku pembangunan untuk mengakomodasikan secara struktural dan fungsional tantangan dan kebutuhan baru".

Dengan demikian revitalisasi dapat dimaknaikan sebagai proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Sehingga secara umum pengertian dari revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan sangat dibutuhkan. Beragam penggunaan kata revitalisasi misalnya dilakukan dalam revitalisasi pendidikan, revitalisasi sebuah kawasan, revitalisasi kearifan lokal dan beragam revitalisasi lainnya seiring dengan perkembangan zaman. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo dan Martokusumo 2002).

Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan kemnafataan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Oleh Karena itu dalam melaksanakan revitalisasi dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek representasi yakni keterlibatan masyarakat dalam mendukung aspek formal dan masyarakat yang terlibat diharapkan tidak hanya masyarakat yang berada dilingkungan tersebut tetapi dalam proses revitalisasi diharapkan masyarakat yang lebih luas juga ikut terlibat

Revitalisasi sebagai sebuah kegiatan memiliki tahapan yang sangat kompleks. tahapan revitalisasi membutuhkan waktu tertentu dan meliputi hal - hal sebagai berikut (Adishakti, 2002) :

1. Intervensi Fisik, mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, untuk tujuan itu kemudian intervensi fisik menjadi penting untuk dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Isu lingkungan (*environmental sustainability*) juga menjadi salah satu isu penting, sehingga sudah seharusnya intervensi fisik memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik yang dilakukan tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

2. Rehabilitasi Ekonomi Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru).
3. Revitalisasi Sosial/Institusional Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjiwa (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

Adapun manfaat revitalisasi dapat dibagi dua yakni manfaat untuk warga setempat terkait dengan upaya untuk penanggulangan kemiskinan, menghindari terbentuknya komunitas statis dengan setidaknya membentuk komunitas yang dinamis, aktif dan memiliki visi ke depan dalam peningkatan taraf hidupnya serta memiliki mobilitas sosial yang cukup tinggi. Selanjutnya revitalisasi juga membawa manfaat terhadap lingkungan terkait dengan pengaruhnya terhadap upaya membangkitkan kegiatan ekonomi rakyat, untuk menunjang usaha ekonomi produktif yang dikembangkan dalam skala rumah tangga dan peningkatan ekonomi dan sosial kawasan.

2. Danau Tempe sebagai Aset Sosial Ekonomi Masyarakat

Danau Tempe terletak di Kabupaten Wajo berlokasi di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak hampir 250 km dari Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini berada di posisi timur laut arah Kota Makassar. Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Wajo tahun 2020 sebanyak 379,079 jiwa. Danau Tempe merupakan Danau Tektonik yang membentang di tiga kabupaten di Sulawesi Selatan, diantaranya Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Soppeng. Danau ini dianggap sebagai danau purba karena terbentuknya danau ini bersamaan dengan terbentuknya daratan Sulawesi yang berada di atas lempeng benua Australia dan Asia.

Danau Tempe sebagai salah satu sumberdaya perairan daratan yang ada di Sulawesi Selatan merupakan salah satu yang terbesar karena danau ini menjadi muara bagi 23 sungai sehingga danau ini juga memiliki kekayaan ikan air tawar. Selain itu Kawasan Danau Tempe juga menjadi kawasan wisata. Kondisi ini kemudian menjadikan Danau Tempe sebagai salah satu sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat di sekitarnya.

Danau Tempe merupakan danau banjiran yang dapat berubah bentang alamnya menurut musim. Pada musim penghujan, akan terbentuk Kompleks Danau Tempe dapat mencapai luas 26 ribu hektar, bahkan bisa mencapai 47 ribu hektar jika terjadi hujan terus-menerus. Pada musim kemarau, Kompleks Danau Tempe akan terbagi menjadi tiga danau, yaitu Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau Taparang Lapompaka (Danau Buaya).

Danau Tempe memperoleh pasokan air utama dari Sungai Bila dan Sungai Walanae serta 28 anak sungai lainnya. Curah hujan yang tinggi dari hulu kedua sungai ini sangat mempengaruhi debit air pada Danau Tempe. Curah hujan pada Sungai Bila berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm, sedangkan Sungai Walanae berkisar 1.500 hingga 2.500 mm. Selain itu, danau ini juga menjadi hulu bagi Sungai Cenranae yang mengalir ke laut. Pada saat kondisi hujan di hilir Sungai Cenranae

(curah hujan rata-rata 2.000 mm). Sehingga ketika curah hujan tinggi baik di hulu ataupun hilir, debit air Danau Tempe dapat meningkat dan kemudian dapat mengakibatkan terjadinya banjir di wilayah sekitar. Danau Tempe tidak memiliki kawasan hutan yang cukup di sekelilingnya. Hutan hanya dapat ditemui pada daratan antara Danau Tempe dan Danau Sidenreng yang berupa hutan rawang

3. Revitalisasi Danau Tempe dan Konflik

Danau Tempe menjadi salah satu dari 15 danau yang ditetapkan sebagai danau kritis di Indonesia oleh Kementerian PUPR. Kondisi Danau Tempe saat ini telah mengalami pendangkalan akibat masifnya pertumbuhan eceng gondok dan sedimentasi. Sehingga penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR yaitu dengan melakukan revitalisasi danau terhadap 15 danau prioritas untuk mengembalikan fungsi alamnya sebagai tampungan air dimana Danau Tempe menjadi salah satu bagian di dalamnya. Kegiatan revitalisasi dilakukan adalah dengan pengerukan hasil sedimentasi danau yang mencapai 8,58 juta m³, pemancangan cerucuk bambu, pengendalian gulma air dengan pembersihan rutin eceng gondok serta pemasangan geokomposit dan geosintetis (Musdah dan Husein, 2014).

Kementerian PUPR memperkuat sinergi dalam upaya revitalisasi melalui upaya penandatanganan nota kesepahaman tentang penyelamatan danau prioritas nasional yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Revitalisasi Danau Tempe merupakan salah satu proyek prioritas milik Kementerian Pekerjaan Umum, dimana ini sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia (KNDI) pada tahun 2009 terkait kesepakatan pengelolaan 15 danau prioritas, salah satunya adalah Danau Tempe di Kabupaten Wajo. Dengan adanya proses kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Wajo yang menempatkan program revitalisasi danau sebagai salah satu bagian didalamnya. Upaya revitalisasi didasari adanya kekhawatiran dari beberapa pihak pemerhati lingkungan terhadap Danau Tempe sebagai salah satu danau yang mengalami kondisi kritis di Indonesia. Kondisi Danau Tempe mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali dan okupansi lahan. Oleh karena itu program revitalisasi menjadi sangat penting. Bentuk revitalisasi yang telah dilakukan adalah dengan pengerukan hasil sidementasi danau yang mencapai 8,58 juta m³, pemancangan cerucuk bambu, pengendalian gulma air dengan pembersihan rutin eceng gondok serta pemasangan geokomposit dan geosintesis, hasil revitalisasi ini akan memberikan penambahan kapasitas daya tampung sebesar 7,23 m³, dari kapasitas volume daya tampung yang ada saat ini sebesar 207,66 juta m³ (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018).

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengerukan endapan danau untuk memperdalam tinggi muka air dan endapan buangnya dimanfaatkan untuk membuat pulau buatan yang diharapkan bisa menjadi objek wisata. Selain itu, revitalisasi akan menambah kapasitas volume tampungan sebesar 7,23 m³, dari kapasitas volume tampungan saat ini sebesar 207,66 juta m³. Dengan bertambahnya volume tampungan akan dapat memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di sekitar Danau Tempe, dari sekitar 23 ribu jiwa menjadi 30 ribu jiwa. Revitalisasi bertujuan untuk mempertahankan dan memperdalam genangan permanen sehingga ekosistem sektor perikanan tetap terjaga, dan tak hanya itu, masyarakat dan

pemerintah juga menghadapi tantangan peningkatan curah hujan akibat kecenderungan peningkatan suhu udara minimum dan maksimum sehingga mengakibatkan meningkatnya banjir. Namun upaya tersebut ternyata tidak selalu diterima secara oleh kelompok masyarakat yang selama ini memanfaatkan keberadaan Danau Tempe sebagai sumber mata pencaharian mereka. Terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan revitalisasi sebagai suatu program yang akan membawa kemanfaatan.

Masyarakat berpandangan bahwa revitalisasi yang dilakukan akan berimplikasi pada mata pencaharian mereka. Masyarakat sekitar Danau Tempe ini secara garis besar terbagi atas dua kelompok profesi, yaitu kelompok nelayan dan kelompok petani. Kedua kelompok ini sangat bergantung pada tingkat elevasi Danau Tempe. Hal inilah yang menimbulkan adanya polarisasi dalam melihat kemanfaatan revitalisasi Danau Tempe. Sebagian masyarakat menolak terutama bagi nelayan skala kecil dan petani yang memanfaatkan lahan pertanian pada saat musim kering. Revitalisasi dianggap telah menyebabkan lahan pertanian yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kemudian akan hilang.

Selain itu, dampak yang lain yang dirasakan oleh masyarakat terutama dialami oleh para nelayan. Para nelayan di sekitar Danau Tempe mengeluh akibat berkurangnya ikan-ikan di danau yang menyebabkan nelayan menjadi cenderung sulit untuk mendapatkan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran tentang kemanfaatan dari program revitalisasi ternyata menimbulkan efek dan pandangan berbeda dari segmen masyarakat lain yang mengalami dampak langsung program tersebut. Artinya harapan untuk memberikan manfaat dari revitalisasi bagi masyarakat tidak berlangsung secara maksimal. Hal ini tentu telah memosisikan masyarakat pada dua kutub berbeda dalam melihat revitalisasi yang dilakukan pemerintah secara bersama antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal ini menjadikan program revitalisasi sebagai program yang dilematis. Pada satu sisi program ini dipandang sebagian masyarakat termasuk pemerintah daerah sebagai suatu program yang akan membawa manfaat besar bahkan telah lama dinantikan terutama jika dikaitkan dengan kondisi banjir yang sering dirasakan oleh masyarakat sebelum revitalisasi. Program ini dianggap mampu meminimalisir banjir yang hampir setiap tahun dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Dalam melakukan revitalisasi, pemerintah berupaya menjadikan Danau Tempe sebagai danau paparan banjir sehingga merupakan tempat penampungan air (terminal air sekunder) dari sejumlah aliran sungai yang ada di sekelilingnya sebelum mengalir keluar ke Teluk Bone melalui Sungai Cenranae. Sebagai terminal sekunder maka fluktuasi tinggi muka air (TMA) Danau Tempe tergantung pada kapasitas aliran sungai yang masuk dan keluar dari danau. Tingginya muka air danau pada musim hujan disebabkan tidak cukupnya kapasitas Sungai Cenranae untuk mengalirkan air keluar dari danau dan menurunnya kapasitas tampungan danau karena pendangkalan akibat sedimentasi sehingga air meluap ke pemukiman dan daerah pertanian. Sementara pada musim kemarau TMA danau menurun dengan drastis sehingga sebagian besar lahan pasang surut danau berubah menjadi lahan pertanian.

Pada sisi lain beberapa kelompok masyarakat petani terutama yang memanfaatkan lahan danau untuk bertani tetap menginginkan air danau rendah/surut. Mereka beranggapan bahwa akan

kesulitan untuk beraktivitas apabila air danau tinggi, terlebih lagi apabila danau sudah dikeruk maka lahan garapan mereka akan semakin dalam dan senantiasa tergenang air. Kondisi tersebut tentu akan mengakibatkan mereka kehilangan lahan yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sebagai salah satu sumber penghidupannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pada konteks elevasi air danau terdapat polarisasi persepsi masyarakat terkait dengan kepentingan mereka atas kondisi Danau Tempe. Terdapat kelompok masyarakat yang yang menginginkan agar elevasi air Danau Tempe terus tinggi. Kelompok ini adalah kelompok nelayan lanra, tongkang, jabba trawl/ kawat dan jala. Disaat bersamaan terdapat juga kelompok nelayan yang menginginkan elevasi air Danau Tempe rendah. Kelompok nelayan tersebut adalah *bungka toddo, belle*, dan strom aki yang aktifitasnya hanya dapat dilakukan secara maksimal jika tingkat elevasi permukaan danau tempe menurun. Selain para kelompok nelayan yang terpolarisasi tersebut, beberapa segmen masyarakat petani di sekitar wilayah Danau Tempe juga sangat menginginkan air danau rendah/ surut. Hal ini terkait dengan metode pemanfaatan lahan yang mereka gunakan yakni dengan bercocok tanam di tepi danau ketika permukaan airnya rendah. Dengan demikian, danau yang direvitalisasi melalui pengerukan maka kemungkinan lahan garapan mereka semakin dalam dan senantiasa akan tergenang air.

Selain permasalahan terkait dengan pemanfaatan lahan dan aspek ekosistem, konflik juga dimungkinkan terjadi akibat dari pola pemanfaatan lahan di kawasan Danau Tempe. permasalahan yang terjadi saat ini semakin mengemuka terkait dengan penguasaan lahan Danau Tempe yang seharusnya dikuasai oleh pemerintah tetapi realita menunjukkan bahwa penguasaan Danau Tempe juga ada di masyarakat. Walaupun pola pemanfaatan lahan negara pada umumnya dilakukan secara diundi, pada kenyataannya masih terdapat lahan yang dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa di Kawasan Danau Tempe terdapat potensi besar untuk konflik sosial. Konflik sosial ini rentang terjadi karena masyarakat yang mempunyai SPPT tersebut merasa telah taat membayar pajak terhadap lahan yang dikuasai sehingga mereka merasa mempunyai hak kepemilikan terhadap lahan tersebut. Dengan demikian mereka merasa berhak melakukan berbagai upaya pemanfaatan atas lahan yang mereka klaim berdasarkan kepentingan pribadinya dengan berdasarkan asumsi pemanfaatan lahan pribadi. Kondisi ini tentu menjadikan aspek komunal dalam pengelolaan maupun pemanfaatan Kawasan Danau Tempe sebagai sumber mata pencaharian menjadi cenderung terabaikan. Upaya-upaya komunal yang misalnya dilakukan oleh pemerintah desa kemudian mendapatkan kendala karena adanya fenomena klaim kepemilikan pribadi atas beberapa lahan di wilayah Danau Tempe.

Kesimpulan

Berbagai kondisi tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya konflik yang mengiringi program revitalisasi Danau Tempe yang dilakukan pemerintah. Konflik ini terkait dengan adanya perbedaan pendirian individu atau kelompok, saat ini Pemerintah Kabupaten Wajo telah melaksanakan program revitalisasi Danau Tempe sebagai salah satu kebijakan yang dilakukan Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mengembalikan fungsinya. Secara umum sikap pemerintah daerah sangat mendukung program kebijakan tersebut sama halnya dengan sebagian masyarakat sekitaran Danau Tempe terutama yang masyarakat yang senantiasa terdampak dari banjir yang terjadi karena luapan

Danau Tempe. mereka telah menantikan program revitalisasi untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Hal ini karena setiap tahunnya masyarakat sering mengalami banjir yang bukan hanya merendam areal pertanian warga, melainkan juga merusak rumah dan harta benda masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu pemerintah daerah dan masyarakat mengharapkan melalui dengan adanya kebijakan revitalisasi yang dikerjakan agar kondisi Danau Tempe di Kabupaten Wajo dapat berfungsi dan kembali sebagaimana mestinya.

Selanjutnya adanya perbedaan kepentingan, Danau Tempe yang dikenal dengan sumber kekayaan alam yang terutama perikanan ini memiliki jenis sektor pemanfaatan, yaitu sektor perikanan, sektor pertanian, jasa transportasi dan pariwisata. Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Danau Tempe tersebut menjadi perhatian bagi beberapa instansi pemerintah terkait. Pemanfaatan sumber daya danau oleh masyarakat sekitar sendiri sudah berlangsung sejak lama dan turun temurun. Masyarakat sekitaran danau yang hampir keseluruhan berprofesi sebagai nelayan dan petani menjadikan sumber daya Danau Tempe ini sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan nelayan dan petani biasanya dilakukan secara bergantian, yakni saat musim penghujan dimana air danau pasang yang dimana sebagian besar masyarakat beraktifitas sebagai nelayan untuk menangkap ikan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan dukungan pembiayaan dan ijin kepada saya dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai bagian dari program beasiswa saya. Rasa terima kasih yang tak terhingga juga saya tujukan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyelesaian tulisan ini.

Referensi

- Danisworo, M. dan Martokusumo, W, 2002. Revitalisasi Kawasan Kota : Sebuah Catatan Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota, URDI Vol.13, Jakarta.
- Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wajo, 2011. Profil Danau Tempe Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan.
- Fajar Setiawan, H. W. 2003. Karakteristik Fisik Danau Tempe Sebagai Danau Paparan Banjir.. Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan MLI.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 2018 Berita PUPR. Retrieved from <http://pu.go.id/berita/view/15397/kementerian-pupr-revitalisasi-danau-tempe>.
- Laretna T, Adishakti, 2002. Pusaka dan Pelestariannya Perlu Sistem yang Mengakar dan Menyeluruh, AIKONI edisi 134, Jakarta.
- Lutfi Muta`ali, 2012. Daya Dukung lingkungan untuk perencanaan pengembangan wilayah, Yogyakarta.
- Muiza Uzwa, 2007. Kajian Penggunaan Lahan di Pinggiran Danau sebagai Lahan Pengembangan Kota Studi Kasus Danau Laut Air Tawar Kota Takengon Aceh Tengah. Skripsi; tidak diterbitkan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Musdah, E., & Husein, R. 2014. Analisis Mitigasi Nonstruktural Bencana Banjir Luapan Danau Tempe. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik, 1(3).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.